

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di lingkungan sekolah, kedisiplinan siswa merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencerminkan sikap tanggung jawab, kesadaran diri, serta kemampuan siswa dalam mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada siswa sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Upaya pembentukan karakter tersebut dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan menetapkan peraturan atau tata tertib sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Tata tertib sekolah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, serta kondusif sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal (Arikunto, 2013).

Tata tertib sekolah biasanya mengatur berbagai aspek perilaku siswa selama berada di lingkungan sekolah, seperti ketepatan waktu datang ke sekolah, penggunaan seragam sesuai dengan ketentuan, sikap dan perilaku terhadap guru maupun sesama siswa, serta larangan membawa atau menggunakan barang-barang yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Melalui aturan tersebut, sekolah berupaya menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab kepada siswa agar mereka dapat memahami batasan perilaku yang dapat diterima di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, tata tertib sekolah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku siswa, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang membantu membentuk karakter dan kepribadian siswa.

Namun dalam praktiknya, penerapan peraturan sekolah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun tata tertib telah disusun dan disosialisasikan kepada seluruh siswa, pelanggaran terhadap aturan sekolah masih sering terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum tentu mampu membentuk perilaku disiplin siswa secara optimal. Hal tersebut juga terjadi di SMK Pembangunan Jaya Yakapi, di mana masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa. Beberapa di antaranya seperti datang terlambat ke sekolah, menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, membawa dan menggunakan telepon genggam saat jam pelajaran berlangsung, serta menunjukkan sikap kurang hormat terhadap guru maupun sesama teman. Berbagai pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan

yang telah ditetapkan oleh sekolah dengan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah dalam menegakkan peraturan serta membina perilaku siswa agar lebih disiplin. Dalam hal ini, keberhasilan penerapan tata tertib sekolah tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan semata, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut diterapkan, dikomunikasikan, serta dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan peran berbagai pihak di lingkungan sekolah untuk memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif. Salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam proses pembinaan perilaku siswa di sekolah adalah guru Bimbingan dan Konseling (BK).

Guru Bimbingan dan Konseling memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membantu siswa mengembangkan potensi diri serta mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi, baik yang berkaitan dengan aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karier. Selain itu, guru BK juga memiliki peran dalam membantu sekolah menegakkan tata tertib serta membina perilaku siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Melalui layanan konseling, bimbingan, serta pendekatan komunikasi yang dilakukan secara personal maupun kelompok, guru BK diharapkan dapat membantu siswa memahami pentingnya kedisiplinan serta menyadari konsekuensi dari setiap perilaku yang mereka lakukan (Prayitno, 2004).

Dalam pelaksanaannya, guru BK tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan konseling, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa mengembangkan sikap positif dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah. Guru BK sering kali menjadi pihak yang menangani siswa yang melanggar tata tertib sekolah, memberikan pembinaan, serta membantu siswa mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif, guru BK diharapkan mampu membantu siswa memahami kesalahan yang dilakukan serta mendorong mereka untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang.

Meskipun demikian, peran guru BK dalam pelaksanaan peraturan sekolah sering kali dipersepsikan secara berbeda oleh siswa. Sebagian siswa memandang guru BK sebagai sosok pembimbing yang membantu menyelesaikan masalah serta memberikan arahan yang positif bagi perkembangan diri mereka. Namun di sisi lain, terdapat pula siswa yang memandang guru BK sebagai pihak yang hanya berperan sebagai “penegak aturan” atau pemberi hukuman ketika

terjadi pelanggaran tata tertib sekolah. Persepsi yang berbeda tersebut dapat memengaruhi cara siswa berinteraksi dengan guru BK serta memengaruhi tingkat keterbukaan mereka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

Persepsi merupakan proses psikologis yang terjadi ketika individu menerima, mengorganisasikan, serta menafsirkan informasi yang diperoleh melalui indera sehingga menghasilkan pemahaman tertentu terhadap suatu objek atau peristiwa. Persepsi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus yang diterima, tetapi juga oleh pengalaman, pengetahuan, sikap, serta kondisi psikologis yang dimiliki oleh individu tersebut (Walgito, 2010). Oleh karena itu, setiap siswa dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap peran guru BK meskipun mereka berada dalam lingkungan sekolah yang sama dan mengalami situasi yang serupa.

Persepsi siswa terhadap peran guru BK menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena persepsi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Apabila siswa memiliki persepsi yang positif terhadap guru BK, maka mereka akan lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta lebih mudah menerima arahan dan bimbingan yang diberikan. Sebaliknya, apabila siswa memiliki persepsi yang negatif terhadap guru BK, maka mereka cenderung merasa takut, enggan, atau bahkan menghindari interaksi dengan guru BK. Kondisi tersebut tentu dapat menghambat proses pembinaan serta mengurangi efektivitas pelaksanaan peraturan sekolah.

Selain itu, penelitian mengenai persepsi siswa terhadap peran guru BK di lingkungan sekolah kejuruan masih relatif terbatas. Padahal, sekolah menengah kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah menengah umum karena lebih menekankan pada kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja serta pembentukan sikap profesional sejak dini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana siswa memandang peran guru BK sebagai pelaksana peraturan sekolah menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Dengan mengetahui persepsi siswa, pihak sekolah dapat melakukan evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan dalam pembinaan siswa serta meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi siswa terhadap peran guru Bimbingan dan Konseling sebagai pelaksana peraturan sekolah. Penelitian ini difokuskan pada siswa kelas XII SMK Pembangunan Jaya Yakapi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana siswa memandang peran guru BK dalam

pelaksanaan tata tertib sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persepsi siswa terhadap peran guru BK serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah dalam meningkatkan efektivitas pembinaan kedisiplinan siswa dan pelaksanaan peraturan sekolah.

Proses mendeteksi sebuah stimulus disebut sebagai persepsi. Makna ini dikonstruksikan berdasarkan representasi fisik yang ada, dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Sebagai contoh, perhatikan tanda 13. Bila di Tanya lagi itu huruf apa, ia mungkin akan menjawab bahwa itu huruf B, namun bila ditanya itu angka berapa, ia akan menjawab bahwa itu angka 13. Tanda-tanda aktualnya tetap sama, namun maknanya berubah sesuai harapan, untuk mengenali sebuah huruf atau angka.

Bagi seseorang yang tidak memiliki pengetahuan yang sesuai untuk mempersepsi sebuah huruf atau sebuah angka, tanda itu mungkin tidak ada artinya.

Bagaimana memahami persepsi, ini salah satunya dapat dilakukan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para psikolog yang disebut sebagai pakar teori Gestalt. Gestalt memiliki arti “Pola” atau “Konfigurasi”. Dalam Bahasa Jerman untuk memahami Gestalt mengacu pada kecenderungan orang untuk mengorganisasikan informasi sensorik menjadi pola atau hubungan. Misalnya mempersepsi kepingan-kepingan atau potongan-potongan informasi yang tidak berhubungan. Dalam hal tersebut biasanya seseorang mempersepsi keseluruhan yang terorganisasi dan bermakna. Untuk aspek-aspek persepsi tertentu prinsip-prinsip Gestalt merupakan penjelasan yang masuk akal.

Ada dua macam penjelasan dalam teori pemrosesan informasi untuk bagaimana mengenali pola dan memberikan makna pada peristiwa sensorik. Pertama disebut sebagai feature analysis (analisis fitur/ciri) bottom up processing (pemrosesan dari bawah ke atas) karena stimulus harus dianalisis menjadi komponen-komponen dan dirakit menjadi sebuah pola yang bermakna dari bawah ke atas yang bergabung dengan sudut 45 derajat dan sebuah garis horizontal di tengah kedua garis itu. Bila melihat komponen-komponen ini, atau apapun yang hampir mendekati seperti A dan A, maka ia mengenali sebuah huruf A. Hal ini menjelaskan bagaimana dia mampu membaca kata-kata yang di tulis tangan oleh orang lain. Dan juga memiliki sebuah prototype (contoh terbaik atau kasus klasik) huruf A yang tersimpan di ingatan untuk digunakan bersama berbagai fitur untuk membantu mendeteksi huruf A.

Bila semua persepsi hanya bersandar pada analisis cara dan prototipe, makna proses belajar akan sangat lambat. Untungnya, manusia memiliki kemampuan untuk mempersepsi berdasarkan pengetahuan dan harapan, yang disebut top down processing (pemrosesan dari

atas ke bawah). Untuk mengenali pola dengan cepat, selain memperhatikan ciri-ciri, juga menggunakan apa yang sudah di ketahui tentang situasi itu, seperti apa yang di ketahui tentang kata-kata atau gambar-gambar atau cara dunia pada umumnya beroperasi. Sebagai permisalan, ia tidak akan pernah melihat tanda-tanda di atas sebagai huruf A, nilai yang belum memilki pengetahuan tentang abjad Romawi. Jadi apa yang diketahui mempengaruhi apa yang sudah diketahui mempengaruhi apa yang dapat di persepsi.

Sesuatu yang kita anggap sebagai dapat mempengaruhi interpretasi kita terhadap sinyal sensorik yang ambigu. Contoh ketika kita yakin akan adanya mahluk luar angkasa yang secara berkalah datang mengunjungungi bumi, dan kemudian kita melihat benda bundar dilangit, maka kita mungkin mengatakan telah melihat hantu yang ternyata hanya sebuah jubah yang tergantung pada pintu.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa persepsi seseorang terbentuk melalui pengalaman, pengetahuan, serta keyakinan yang dimilikinya. Hal ini juga berlaku dalam konteks pendidikan, di mana persepsi menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi cara individu memandang proses belajar dan lingkungan sekolah. Pendidikan sendiri merupakan suatu proses yang terencana dan terarah untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi diri, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Melalui pendidikan, individu diharapkan mampu membentuk kepribadian yang matang serta memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan, yang berlangsung di sekolah atau diluar sekolah dalam mempersiapkan siswa untuk dapat memainkan perannya dalam berbagai lini kehidupan secara baik untuk masa yang akan datang. Pendidikan merupakan upaya sistematis dalam mengantarkan siswa sebagai individu untuk menjadi manusia seutuhnya yang mencakup dalam berbagai komponen.

Tujuan dan fungsi pendidikan adalah untuk memberikan bekal yang diperlukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan mampu membangun sikap dan tingkah laku serta pengetahuan dan ketrampilan yang perlu dan berguna bagi kelangsungan dan kemajuan diri dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Sekolah sebagai sarana pendidikan formal menjadi tempat yang menyediakan pelayanan pengembangan pribadi dan kesejahteraan bagi siswa, pelayanan pengajaran dan administratif. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bertanggung jawab untuk dapat mengembangkan kemampuan anak seoptimal mungkin, hal ini di lakukan dengan jalan menempa peserta didik

sehingga mempunyai bekal ilmu pengetahuan, sikap kecakapan, budi pekerti serta keterampilan yang berguna bagi individu itu baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai kebijakan tertentu yang dituangkan dalam bentuk aturan. Salah satunya adalah aturan sekolah yang disebut dengan tata tertib. Siswa dituntut untuk menaati tata tertib sekolah di dalam menuju keberhasilan proses belajar mengajar, membentuk karakteristik siswa agar disiplin dan bertanggung jawab. Tata tertib sekolah dapat berjalan dengan baik apabila sikap disiplin terhadap tata tertib atau peraturan sekolah, berperan sebagai faktor eksternal siswa, dan sebagai dasar berperilaku. Peraturan sekolah dibuat agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengontrol diri dan bertanggungjawab serta berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungan sekolah. Disiplin sekolah dianggap sebagai sarana agar proses belajar dapat efektif. Karena tujuan disiplin di sekolah adalah efektifitas proses belajar mengajar, maka perilaku yang dianggap mendukung proses belajar mengajar dianggap masalah disiplin.

Pendidikan formal di Indonesia tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis kepada peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab sosial—salah satunya melalui penerapan disiplin di lingkungan sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dengan adanya tata tertib yang jelas; namun pada praktiknya, pelanggaran terhadap aturan sekolah masih sering terjadi, bahkan di sekolah kejuruan.

Pendidikan vokasi (SMK) memiliki tujuan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terampil tetapi juga membentuk sikap, tata tertib, dan perilaku profesional siswa sesuai aturan sekolah dan kebutuhan dunia kerja. Sekolah sebagai lembaga sosial perlu memastikan bahwa kebijakan dan peraturan sekolah dijalankan secara konsisten agar tercipta iklim belajar yang kondusif, aman, dan tertib. Dalam konteks itu, guru Bimbingan dan Konseling (BK) memegang peran penting sebagai fasilitator, mediator, dan pelaksana program yang mendukung penerapan peraturan sekolah serta membantu siswa memahami dan menginternalisasi aturan tersebut.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku

Makna dari bimbingan itu adalah proses pemberi bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli didalamnya agar individu tersebut dapat mengenal dirinya sendiri dan lingkungannya.

Konseling adalah proses pemberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut sebagai konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang disebut dengan konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapinya oleh kondeli (klien).

Peran guru BK meliputi layanan bimbingan individu dan kelompok, pemberian informasi, pembinaan sikap dan nilai, serta fasilitasi pemecahan masalah siswa — fungsi-fungsi ini menjadikan guru BK bukan hanya konselor akademik/emosional tetapi juga aktor penting dalam pelaksanaan kebijakan dan aturan sekolah. Namun, efektivitas peran tersebut sering dipengaruhi oleh bagaimana siswa mempersepsikan tindakan dan fungsi guru BK: apakah mereka melihat guru BK sebagai penegak aturan, sebagai pembimbing yang mendampingi, atau sebagai pihak yang “mengawasi” dan “mengatur” perilaku. Persepsi siswa inilah yang menentukan tingkat kepatuhan, keterlibatan, dan respon terhadap peraturan sekolah.

Di SMK Pembangunan Jaya Yakapi — khususnya pada kelas 12 yang menghadapi tekanan akademik, persiapan kerja/magang, serta transisi menuju dunia kerja atau pendidikan lanjutan — peranan guru BK dalam mengkomunikasikan, menegakkan, dan memediasi peraturan sekolah menjadi semakin krusial. Namun, belum tentu persepsi siswa terhadap peran guru BK sejalan dengan harapan sekolah atau kebijakan formal. Mispersepsi atau interpretasi berbeda dapat menyebabkan konflik, resistensi terhadap aturan, atau tidak optimalnya fungsi pendidikan karakter yang diharapkan sekolah.

Di SMK Pembangunan Jaya Yakapi, meskipun peraturan sekolah telah disusun secara sistematis dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, kenyataannya pelanggaran tata tertib masih sering terjadi dalam praktik sehari-hari. Bentuk pelanggaran yang kerap dijumpai antara lain siswa datang terlambat ke sekolah, menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, membawa dan menggunakan telepon genggam saat jam pelajaran berlangsung, serta menunjukkan sikap kurang hormat terhadap guru maupun sesama teman. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan perilaku siswa di lapangan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan aturan semata tidak secara otomatis mampu membentuk perilaku disiplin siswa. Efektivitas tata tertib sekolah sangat bergantung pada sejauh mana aturan tersebut dipahami, diinternalisasi, dan diterima oleh siswa sebagai bagian dari kebutuhan bersama, bukan sekadar kewajiban yang bersifat memaksa. Ketika aturan hanya dipandang sebagai alat kontrol atau hukuman, siswa cenderung mematuhiinya secara sementara dan situasional, terutama saat berada di bawah pengawasan guru.

Selain itu, cara implementasi aturan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilannya. Penerapan aturan yang lebih menekankan pada sanksi tanpa diimbangi dengan pendekatan edukatif dan komunikatif berpotensi menimbulkan resistensi dari siswa. Dalam situasi seperti ini, siswa mungkin mematuhi aturan karena takut akan hukuman, bukan karena kesadaran akan nilai dan tujuan dari aturan tersebut. Hal ini menyebabkan pelanggaran kembali terjadi ketika pengawasan melemah atau ketika siswa merasa memiliki kesempatan untuk menghindarinya.

Peran guru, khususnya guru Bimbingan dan Konseling, menjadi sangat krusial dalam menjembatani pemahaman siswa terhadap makna aturan sekolah. Guru BK tidak hanya berfungsi sebagai penegak disiplin, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami konsekuensi, manfaat, serta nilai-nilai positif di balik setiap peraturan. Melalui pendekatan konseling dan komunikasi yang persuasif, aturan dapat diposisikan sebagai sarana pembentukan karakter, tanggung jawab, dan kedewasaan siswa.

Dengan demikian, permasalahan pelanggaran tata tertib di SMK Pembangunan Jaya Yakapi tidak dapat dilepaskan dari proses komunikasi dan pembinaan yang menyertainya. Upaya peningkatan kedisiplinan siswa perlu dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara aturan yang jelas, penerapan yang konsisten, serta pendekatan pembinaan yang humanis dan edukatif. Pendekatan inilah yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan siswa terhadap aturan dan mendorong terbentuknya perilaku disiplin yang berkelanjutan.

Selain itu, faktor latar belakang siswa yang beragam turut memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan sekolah. Perbedaan lingkungan keluarga, kebiasaan sehari-hari, serta pengaruh pergaulan di luar sekolah dapat membentuk sikap siswa terhadap aturan dan otoritas. Siswa yang terbiasa dengan pola disiplin yang longgar cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tata tertib sekolah yang ketat. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan pembinaan yang lebih personal dan kontekstual agar aturan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga relevan dengan pengalaman dan realitas kehidupan siswa.

Di sisi lain, konsistensi dalam penegakan aturan juga menjadi faktor penentu efektivitas tata tertib sekolah. Ketidaksamaan perlakuan dalam pemberian sanksi atau pembinaan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan siswa, yang pada akhirnya melemahkan kewibawaan aturan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru Bimbingan dan Konseling dalam menerapkan aturan secara adil dan konsisten. Dengan adanya kesamaan persepsi dan langkah pembinaan yang terintegrasi, diharapkan kedisiplinan siswa di SMK Pembangunan Jaya Yakapi dapat terbentuk secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam kerangka sekolah, guru

Bimbingan dan Konseling (BK) memainkan peran penting dalam menjembatani antara logika aturan dan kebutuhan mendidik siswa secara manusiawi. Secara ideal, guru BK bertugas untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier melalui layanan konseling individual, konseling kelompok, dan layanan responsif. Namun di banyak sekolah, termasuk SMK, guru BK juga ikut bertanggung jawab dalam penegakan disiplin dan pengawasan pelanggaran. Keberadaan dua fungsi ini — mendampingi dan menegakkan — menuntut keseimbangan dan komunikatif agar tidak memunculkan ketegangan dalam hubungan siswa-guru. Bila siswa memandang guru BK lebih sebagai “penegak aturan” ketimbang pendamping, maka keberhasilan bimbingan dan penerimaan aturan bisa terganggu.

Guru bimbingan konseling di sekolah mempunyai tugas menjaga dan mempertahankan tata tertib, disiplin, dan keamanan sekolah dengan cara memberikan nasehat dan masukan kepada siswa. Guru BK seharusnya mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada siswa di sekolah, karena guru BK mempunyai tanggung jawab pada siswa di lingkungan sekolah, baik yang mengarah pada hal positif misalnya memberikan motivasi atau semangat belajar kepada siswa yang memiliki nilai kurang dalam hal pelajaran, ataupun yang negatif, misalnya meluruskan atau memperbaiki sikap dan perilaku siswa yang dianggap melanggar peraturan sekolah antara lain sikap suka membolos, suka terlambat masuk sekolah, suka membantah perintah guru, merokok di lingkungan sekolah, melalaikan tugas.

Dari aspek regulasi formal, tugas dan wewenang guru BK diperkuat melalui Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling, yang menyatakan bahwa layanan BK harus sistematis, objektif, logis, berkelanjutan, dan terprogram guna mendukung perkembangan siswa menuju kemandirian (Pasal 1). Peraturan ini juga mengatur strategi layanan, komponen program, mekanisme penyelesaian masalah, dan peran konselor atau guru BK di sekolah (Pasal 9). Namun penelitian implementasi menunjukkan bahwa tidak semua sekolah dapat menyelenggarakan layanan BK ideal sesuai regulasi: aspek manajemen, kompetensi guru, rasio konselor-siswa, dan dukungan manajemen sekolah menjadi kendala yang mempengaruhi kualitas layanan BK di sekolah menengah (SD–SMA/SMK).

Disekolah-sekolah masih banyak siswa yang tidak mengetahui peran guru secara jelas, oleh karena itu pihak sekolah melakukan sosialisasi kepada siswa baru tentang tugas-tugas dan pentingnya peran guru bimbingan konseling disekolah sehingga siswa dapat mengerti apa peran guru bimbingan konseling secara jelas, tidak hanya pada menindak indiscipliner.

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan, dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (RI, 2003: 12-13).

Pernyataan di atas, tujuan dan fungsi pendidikan adalah untuk memberikan bekal yang diperlukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan mampu membangun sikap dan tingkah laku serta pengetahuan dan ketrampilan yang perlu dan berguna bagi kelangsungan dan kemajuan diri dalam masyarakat, bangsa dan negara. (Arikunto,1999).

Guru bimbingan konseling di sekolah mempunyai tugas menjaga dan mempertahankan tata tertib, disiplin, dan keamanan sekolah dengan cara memberikan nasehat dan masukan kepada siswa. Guru BK seharusnya mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada siswa di sekolah, karena guru BK mempunyai tanggung jawab pada siswa dilingkungan sekolah, baik yang mengarah pada hal positif misalnya memberikan motivasi atau semangat belajar belajar kepada siswa yang memiliki nilai kurang dalam hal pelajaran, ataupun yang negatif, misalnya meluruskan atau memperbaiki sikap dan perilaku siswa yang dianggap melanggar peraturan sekolah antara lain sikap suka membolos, suka terlambat masuk sekolah, suka membantah perintah guru, merokok dilingkungan sekolah, melalaikan tugas.

Melihat besarnya peran bidang bimbingan dan konseling yang diharapkan, mampu menangani permasalahan siswa di sekolah yang antara individu satu dengan individu lain memiliki permasalahan yang berbeda-beda serta mempunyai keunikan baik dalam tingkah laku, sikap maupun kepribadiannya. Seorang pembimbing sekaligus konselor juga harus mampu berperan sebagai seorang teman bagi siswa pada satu situasi, serta mampu berperan sebagai pendengar atau motivator pada situasi lain di samping peran-peran lain yang harus dilakukan.

Kedisiplinan siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, sehingga tidak ada faktor tunggal yang berdiri sendiri. Adapun faktor yang memengaruhi ketaatan siswa untuk mematuhi tata tertib sekolah terdiri dari faktor dari dalam siswa (internal) dan faktor dari luar diri siswa (eksternal). Faktor dari dalam diri siswa meliputi: niat, motivasi, pemahaman dan kesadaran siswa, sedangkan faktor dari luar meliputi: bimbingan guru, bimbingan orang tua, lingkungan masyarakat dan faktor budaya. Konteks ini tentu saja masih banyak lagi masalah yang dapat ditentukan berkaitan dengan ketaatan siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah (Marsudi, 2003).

Guru bimbingan konseling di sekolah mempunyai peran yang sangat besar terhadap perkembangan mental anak. Perkembangan mental anak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu pergaulan dalam sekolah. Sekolah merupakan tempat pertemuan siswa, yang terdapat bermacam-macam karakteristik budaya atau kebiasaan yang dibawa individu dari keluarga dan lingkungannya masing-masing. Budaya tersebut ada yang sejalan dengan peraturan sekolah, ada pula yang menyimpang. Menurut Prayitno(1999) guru bimbingan konseling dituntut untuk memberikan bimbingan yang optimal kepada siswa agar siswa yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan siswa dan sarana yang ada dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa unjuk kerja guru Bimbingan dan Konseling (BK) belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peran profesionalnya. Kondisi ini tercermin dari masih adanya penafsiran dan persepsi keliru terhadap guru BK, baik dari kalangan siswa maupun warga sekolah lainnya. Guru BK kerap dipandang sebelah mata, dianggap sebagai guru yang tidak memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, serta dinilai tidak memiliki jam mengajar yang jelas seperti halnya guru mata pelajaran.

Persepsi tersebut diperkuat oleh anggapan bahwa guru BK cenderung hanya mencari permasalahan siswa, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib sekolah. Akibatnya, keberadaan guru BK lebih sering diasosiasikan dengan penanganan kasus disiplin dibandingkan dengan fungsi konseling yang bersifat preventif, pengembangan, dan kuratif. Situasi ini menyebabkan peran guru BK sebagai pendamping perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karier siswa belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh peserta didik.

Di kalangan siswa, bimbingan dan konseling masih sering dipersepsikan sebagai “polisi sekolah” yang bertugas memberikan sanksi atau hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan. Persepsi tersebut menimbulkan rasa takut dan enggan pada diri siswa untuk datang secara sukarela ke ruang BK. Siswa cenderung mendatangi guru BK hanya ketika dipanggil atau ketika menghadapi masalah kedisiplinan, bukan untuk berkonsultasi mengenai permasalahan pribadi, sosial, maupun akademik yang mereka alami.

Bahkan dalam beberapa kasus, persepsi negatif terhadap layanan BK berkembang lebih jauh, di mana guru BK dianggap memiliki peran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas profesionalnya, seperti menagih pembayaran SPP bagi siswa yang menunggak. Anggapan ini semakin memperkuat citra negatif guru BK di mata siswa dan mengaburkan esensi bimbingan

dan konseling sebagai layanan bantuan yang bersifat edukatif, humanis, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal guru BK sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pendidikan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas fungsi dan peran guru BK kepada seluruh warga sekolah, serta optimalisasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar dapat diterima secara positif dan dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta didik.

Selain dipengaruhi oleh persepsi siswa, kurang optimalnya pemanfaatan peran guru BK juga tidak terlepas dari faktor struktural dan sistemik di lingkungan sekolah. Beban administratif yang cukup tinggi, keterbatasan waktu layanan, serta jumlah siswa yang tidak sebanding dengan jumlah guru BK menyebabkan pelaksanaan layanan konseling individual maupun kelompok belum dapat dilakukan secara maksimal. Akibatnya, guru BK lebih sering terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran yang bersifat insidental dibandingkan dengan kegiatan pendampingan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa.

Di sisi lain, minimnya sosialisasi mengenai fungsi dan manfaat layanan bimbingan dan konseling turut memperkuat persepsi keliru yang berkembang di kalangan siswa. Ketidaktahuan siswa terhadap peran guru BK sebagai konselor, fasilitator, dan pendamping perkembangan diri menyebabkan layanan BK belum dimanfaatkan sebagai ruang aman untuk berbagi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi dan pendekatan yang lebih edukatif agar keberadaan guru BK dapat dipahami secara tepat dan diterima sebagai bagian penting dalam proses pembinaan dan pendidikan siswa di sekolah. Beragam penelitian empiris menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap guru BK sangat variatif dan bisa memengaruhi sejauh mana layanan BK dan aturan sekolah mendapat penerimaan. Misalnya, studi di SMA Negeri 5 Mataram mengungkapkan bahwa rata-rata siswa memberi penilaian “baik” terhadap pelaksanaan layanan BK melalui indikator kedisiplinan, kinerja guru BK, dan layanan pendukung lainnya (lebih dari 60 %). Namun penelitian lain di SMP Tri Sukses Boarding School Jambi menunjukkan adanya kecenderungan bahwa siswa memandang tugas guru BK sebagai “polisi sekolah” — bertindak lebih dominan pada aspek penegakan dan hukuman ketimbang pembinaan. Penelitian tentang persepsi kompetensi sosial guru BK di SMK menunjukkan bahwa sebagian siswa mengalami keraguan terhadap aspek sosial guru BK: apakah guru BK dapat dipercaya, dapat membangun hubungan baik, atau hanya menjalankan peraturan birokrasi sekolah semata.

Variasi persepsi ini memunculkan pertanyaan kritis: bagaimana siswa memaknai tindakan guru BK ketika menjalankan peraturan sekolah? Apakah siswa melihat guru BK sebagai figur yang adil dan komunikatif, atau sebagai figur yang mengekang dan menghakimi? Faktor-faktor lokal seperti gaya komunikasi, keadilan dalam penerapan sanksi, pengalaman interaksi sebelumnya antara siswa dan guru BK, budaya sekolah, dan pemahaman siswa tentang tujuan layanan BK sendiri bisa sangat mempengaruhi pembentukan persepsi ini.

Dalam konteks SMK Pembangunan Jaya Yakapi, yang menuntut siswa untuk siap terjun di dunia kerja dan mengedepankan profesionalisme, relasi antara aturan sekolah dan layanan BK menjadi sangat penting. Jika siswa memiliki persepsi positif terhadap tindakan guru BK dalam menegakkan aturan, mereka lebih mungkin menyikapi aturan sebagai bagian dari pembinaan karakter, bukan sebagai tekanan eksternal. Sebaliknya, jika persepsi negatif mendominasi, siswa bisa menunjukkan resistensi atau jarak emosional terhadap bimbingan guru BK dan aturan sekolah.

Mengingat pentingnya dimensi persepsi ini dalam keberhasilan penerapan disiplin dan hubungan interpersonal dalam sekolah, penelitian ini dilakukan untuk menggali secara mendalam bagaimana persepsi siswa kelas 12 di SMK Pembangunan Jaya Yakapi terhadap peran guru BK sebagai pelaksana peraturan sekolah melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini cocok untuk menangkap makna, narasi pengalaman, dan nuansa psikologis yang tidak bisa diukur hanya lewat angka. Dengan begitu, hasil penelitian diharapkan memberi rekomendasi agar peran guru BK dalam pelaksanaan tata tertib dapat dijalankan dengan cara yang lebih diterima siswa, lebih komunikatif, adil, dan dapat memperkuat iklim sekolah yang kondusif.

1. 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi siswa SMK Pembangunan Jaya Yakapi terhadap peran guru BK sebagai pelaksana peraturan sekolah?

2. 1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana persepsi siswa kelas 12 SMK Pembangunan Jaya Yakapi terhadap peran guru BK dalam melaksanakan peraturan sekolah.

3. 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang Bimbingan dan Konseling, khususnya yang berkaitan dengan persepsi siswa terhadap peran guru BK dalam

konteks penegakan peraturan sekolah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan teori persepsi dan teori peran guru BK di lingkungan sekolah kejuruan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Guru BK: Sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan peran sebagai pembimbing sekaligus penegak disiplin agar tercipta hubungan yang lebih komunikatif dengan siswa
- b. Bagi Sekolah: Sebagai dasar pertimbangan untuk memperbaiki sistem penerapan peraturan sekolah agar lebih efektif dan diterima oleh seluruh peserta didik.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Sebagai referensi untuk penelitian lanjutan mengenai persepsi siswa terhadap layanan BK atau peran guru dalam konteks lain.

4. 1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi kajian teori yang relevan, penelitian terdahulu, research gap, serta kerangka konsep penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi informan penelitian, penyajian hasil wawancara atau data yang diperoleh dari lapangan, serta analisis dan pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan oleh peneliti berdasarkan temuan penelitian, baik untuk pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.